

Created with



MALINDO AND CONFLICT MANAGEMENT IN SOUTHEAST ASIA: SOCIAL AND CULTURAL APPROACHES TO THE ENHANCEMENT OF INDONESIA-MALAYSIA RELATIONS

Dr. Baiq Wardhani, Citra Hennida MA, Dr. Wahyu Wicaksana¹
Departemen Hubungan Internasional,
FISIP Universitas Airlangga

ABSTRACT

This paper aims to identify major social and cultural problems facing the relationship between Indonesia and Malaysia, and to explore policy options to resolve them. The argument is that there is pressing need for a comprehensive approach, paralleled by institutionalization, which can manage incompatibilities arising in the interactions between peoples and governments of Indonesia and Malaysia. We proceed to discuss it in three sections. Firstly, the paper analyses three important issues, including disputes over cultural heritage, migrant workers, and diasporas issue, which so far have become hot topics in texts and talks of Jakarta-Kuala Lumpur links. Secondly, it tries to provide some feasible policy choices to deal with the aforementioned issues. And finally, it highlights the relevance of institutional building – in the form of MALINDO – for conflict management purposes between Indonesia and Malaysia. Importantly, this design can have saliency in Southeast Asian context.

Keywords: *Indonesia, Malaysia, MALINDO, conflict management, social and cultural approaches.*

1. PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia-Malaysia yang telah berjalan selama lebih dari 40 tahun selalu mengalami pasang surut, berbalikan dengan keadaan selama masa Indonesia dan Malaysia sebelum merdeka. Sebelum terbentuk menjadi negara berdaulat, 'Indonesia' dan 'Malaysia' pernah memiliki keinginan untuk membentuk 'the Greater Malay' atau 'the Greater Indonesia'. Namun keinginan tersebut tidak pernah terwujud karena berbagai faktor yang berkembang dalam setting sejarah pada masa setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kenyataan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan saudara serumpun ternyata tidak dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menciptakan hubungan bilateral yang konstruktif. Makalah ini tidak secara khusus membahas mengenai latar belakang segala persoalan yang pernah menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Malaysia, tetapi menengahkan dua isu yang menjadi sampel 'konflik' (sengketa warisan budaya dan buruh migran) serta usulan solusi dari perspektif akademik dan satu isu (diaspora) yang dapat dikembangkan sebagai penghubung untuk lebih meningkatkan hubungan antara dua negara.

2. SENGKETA WARISAN BUDAYA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Pada bulan Agustus 2009 stasiun TV Discovery Channel menayangkan sebuah video klip iklan promosi berjudul 'Anigmatic Malaysia' yang menampilkan aneka warisan budaya Malaysia. Dalam video promosi wisata berdurasi 23 detik tersebut terlihat sepasang penari Bali yang tengah mementaskan tari *pendet*, tarian sakral untuk upacara keagamaan di pura (*Seattle Times* 4 September 2009). Reaksi keras pun muncul di

¹ Authors are lecturers of International Relations, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University Surabaya.

Indonesia. Puluhan seniman dan artis, serta ratusan demonstran turun ke jalan untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai upaya Malaysia untuk mencuri harta kultural Indonesia. Klaim Malaysia atas tari *pendet* hanyalah satu dari sekian aksi sepihak yang menimbulkan kontroversi dengan Indonesia. Sebelumnya telah pernah terjadi ketegangan antara Jakarta dan Kuala Lumpur akibat klaim kepemilikan Malaysia atas lagu rakyat rasa sayang yang berasal dari Maluku, wayang kulit, kain batik, keris, reog, angklung hingga makanan khas Indonesia seperti rendang (Marks 2009).

Protes terhadap Malaysia cepat melibatkan luapan emosi nasionalisme yang termanifestasi menjadi sikap permusuhan. Mulai dari politisi Senayan hingga masyarakat umum turut mengekspresikan sentimen anti-Malaysia (Noor 2009). Di Jakarta sebuah organisasi massa yang menamakan diri Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mengaku telah menghimpun tidak kurang dari 1,500 relawan untuk berperang melawan Malaysia. Menurut laporan media lokal, relawan tersebut telah dibekali dengan ketrampilan militer serta ilmu hitam (*black magic*). Mahasiswa di berbagai kampus juga turut melancarkan protes anti-Malaysia. Siaran televisi nasional seringkali menunjukkan aksi para demonstran yang membakar bendera Malaysia serta bendera simbolisasi negeri jiran. Teknologi internet pun menjadi media perang melawan Malaysia. Bisa ditemukan halaman *facebook* berjudul 'Kami Benci Malaysia'. Hujatan seperti 'Maling-sia' marak ditulis oleh para anggota beranda tersebut. Politik *ganjang Malaysia* (crush Malaysia) sangat populer dimana mana pada minggu-minggu berlangsungnya protes. Pihak Malaysia tidak tinggal diam. Isyarat siaga disampaikan oleh Sekretaris Keamanan Nasional Datuk Tajudeen Abdul Wahab. Tajudeen menginstruksikan kepada angkatan perang Malaysia agar siaga penuh di perbatasan dengan Indonesia demi mengantisipasi segala potensi serangan asing (*Malay Mail* 10 September 2009).

Menyikapi situasi yang kian memanas, Pemerintah Malaysia melalui menteri kebudayaan nasional dan pariwisatanya menyampaikan permintaan maaf sehubungan telah terjadinya kontroversi soal tari *pendet*. Menurut Pemerintah Malaysia, klip promosi wisata yang menampilkan tari *pendet* bukanlah merupakan produk

lembaga resmi kerajaan Malaysia, melainkan diproduksi oleh pihak ketiga, perusahaan iklan swasta. Selain itu, Malaysia menegaskan bahwa penayangan klip tari *pendet* tidak termasuk ke dalam program promosi *visit Malaysia 2009*. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menjawab pembelaan Malaysia dengan mengatakan jika permintaan maaf secara formal saja belum cukup untuk meredakan serangkaian ketegangan antara kedua bangsa karena tuntutan sepihak Kuala Lumpur atas simbol-simbol kekayaan budaya nasional Indonesia (Hunt 2009). Discovery Channel juga akhirnya menarik klip tari *pendet* dalam iklan wisata Malaysia dari semua acaranya (*Seattle Times* 4 September 2009).

Dalam konteks yang lebih luas, kontroversi soal tari *pendet* merefleksikan kompleksitas hubungan antarbangsa di Asia Tenggara. Secara sosiokultural entitas politik nasional berdaulat di Asia Tenggara terbentuk dari kelompok-kelompok etnis yang sedikit banyak punya relasi historis dan kebudayaan. Oleh karena itu, terdapat elemen-elemen kebudayaan yang identik di antara mereka. Tiap-tiap negara menggunakan satu atau lebih elemen budaya untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Sehingga, benturan kepentingan akibat

klaim unsur kebudayaan pun lumrah terjadi. Thailand dan Kamboja bersengketa soal kepemilikan tari *jeeb* dan kuil Preah Vihear. Malaysia dan Singapura saling berebut hak milik atas kuliner seperti mie laksa, bakuteh dan nasi ayam Hainan (*Phuket News* 20 Agustus 2011).

Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana cara mengatasi permasalahan klaim warisan budaya tersebut? Apakah diplomasi merupakan solusi yang tepat? Bagaimana posisi ASEAN dalam menyikapi kontroversi budaya di antara negara anggotanya?

Penyelesaian konflik warisan budaya melalui jalur hukum hanya akan menimbulkan eksese negatif jangka panjang. Di satu sisi hukum nasional tiap negara belum menyediakan perangkat yang memadai untuk meresolusi persoalan-persoalan yang telah muncul. Sementara di sisi lain bila masalah klaim kebudayaan diselesaikan lewat jalur litigasi internasional, hal itu berpotensi mengganggu hubungan baik antarbangsa karena sentimen dan persepsi negatif kepada pihak yang menang sebagai 'pencuri' akan terus berlanjut. Pelajaran berharga bisa diperoleh melalui kasus sengketa Kepulauan Sipadan dan I

dan Kuala Lumpur yang hingga kini tetap meninggalkan 'luka' bagi bangsa Indonesia. Karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan alternatif.

Konflik yang melibatkan elemen budaya sebagai penanda identitas nasional harus dikelola melalui dua mekanisme, yakni pengakuan dan mediasi kultural. ASEAN adalah institusi regional yang tepat untuk melakukan fungsi mediasi sekaligus menegakan pengakuan atas kebudayaan nasional masing-masing negara anggota. Ketegangan antara Jakarta dan Kuala Lumpur karena klaim tari *pendet* berhasil dimitigasi berkat fasilitasi lembaga Eminent Persons Group. Ketua Eminent Persons Group Try Sutrisno mengungkapkan 'bila saja kedua negara mau terbuka soal kepentingan masing-masing, maka situasi yang memanas akibat sengketa budaya tidak akan terjadi...dan hubungan keduanya tidak akan memburuk...' (*The Jakarta Post* 20 September 2009).

Keberadaan Komunitas Sosial dan Kultural ASEAN (ASEAN Social and Cultural Community, ASCC) dapat menjadi wadah yang tepat untuk proses pengakuan dan mediasi budaya sesama anggota ASEAN. Pengakuan dimulai dari identifikasi dan telaah yang mendalam atas klaim yang muncul, dan memberikan penilaian mengenai relevansi dan substansinya. Rekomendasi-rekomendasi penyelesaian konflik budaya setidaknya memuat dua elemen penting, yakni; *mine/yours* atau *ours*. Maksudnya adalah kepemilikan atas elemen kebudayaan bersifat pasti, dan klaim dianggap selesai setelah konfirmasi pengakuan diberikan.

3. PERMASALAHAN BURUH MIGRAN

Malaysia adalah salah satu negara utama yang menjadi tujuan buruh migran. Keberadaan buruh migran di Malaysia adalah penting dalam pembangunan ekonominya (Maria, 2010). Berdasarkan data dari UNDP tahun 2011, jumlah buruh migran di Malaysia memiliki porsi 6% dari keseluruhan jumlah penduduk. Mayoritas buruh migran berasal dari Indonesia dan mereka bekerja pada sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga.

Namun, tidak semua buruh migran memiliki dokumen resmi (legal) ketika memasuki Malaysia. Jumlah buruh ilegal adalah hampir sama dengan jumlah buruh legal. Berdasarkan laporan dari TIP (Trafficking in Persons) AS 2010, di tahun 2009 jumlah buruh migran yang memiliki dokumen resmi adalah sekitar 2 juta buruh, sedangkan 1,9 juta lainnya belum memiliki dokumen resmi. Buruh tanpa dokumen resmi sama artinya dengan ilegal. Mereka rawan sebagai korban penyelundupan dan perdagangan orang. Ilegalitas juga berdampak langsung dengan tidak terlindunginya hak-hak sebagai pekerja. Maka tidak mengherankan jika kasus-kasus seperti eksploitasi, penipuan, pemerkosaan, pelecehan seksual, kerusuhan, dan kejahatan lainnya sering menimpa buruh migran, baik posisinya sebagai korban maupun pelaku. Misalnya di tahun 2001, jumlah buruh migran Indonesia yang terkena kasus-kasus kriminal seperti pemerkosaan, kerusuhan, pencurian dan pembunuhan berjumlah sekitar 1.051 orang (Liow, 2003).

Diatas itu semua, besarnya jumlah buruh migran yang tidak memiliki dokumen resmi mengartikan bahwa ada yang salah dalam penanganan keimigrasian dan adanya kekurangberpihakan pemerintah terhadap masalah buruh migran di kedua negara. Selanjutnya artikel ini akan berfokus pada permasalahan buruh migrant bagaimana selama ini penanganannya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh Malindo dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan buruh migran.

Indonesia dan Malaysia berbatasan langsung. Akses dari Indonesia ke Malaysia bisa dilalui melalui darat, laut dan udara. Pilihan yang paling banyak digunakan oleh para buruh migran adalah melalui darat dan laut. Migrasi Indonesia dan Malaysia sudah lama terjadi, jauh sebelum keduanya dipisahkan oleh batas-batas teritorial negara modern. Perdagangan dan perang adalah dua motivasi utama terjadinya migrasi tersebut. Setelah kemerdekaan dan tingginya industrialisasi di Malaysia kemudian menarik minat migrasi penduduk Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Buruh Indonesia mengisi sektor-sektor yang ditinggalkan oleh angkatan kerja Malaysia yaitu perkebunan. Politik Bumiputera dan masuknya perempuan dalam angkatan kerja juga kemudian meninggalkan sektor-sektor pekerjaan kasar dan informal untuk kemudian dikerjakan oleh buruh-buruh migran yaitu konstruksi dan domestik (Liow, 2003; Kaur, 2005). Tahun 1991, pemerintah Malaysia

mengeluarkan kebijakan perekrutan buruh migran untuk mengerjakan sektor perkebunan, konstruksi dan domestik (Kaur, 2005). Dibukanya akses lapangan kerja untuk sektor-sektor tersebut kemudian memunculkan arus migrasi buruh migran yang besar dari Indonesia.² Buruh migran Indonesia lantas dianggap sebagai kontributor pada pembangunan ekonomi dan pembentukan budaya Malaysia.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, buruh migran Indonesia yang terlalu mendominasi proporsi dianggap sebagai akar munculnya berbagai masalah sosial, tindakan kejahatan, ancaman penyakit, dan ancaman terhadap keamanan nasional di Malaysia (Kaur, 2005). Hal-hal tersebut lantas digunakan sebagai alasan untuk kemudian pemerintah Malaysia bertindak keras terhadap buruh migran dan kemudian hirau dengan perlindungan hak-haknya. Pendekatan yang selama ini dilakukan adalah pendekatan “keamanan”, dimana buruh migran dianggap sebagai pelaku kriminalitas dan harus dihukum dan dicegah masuknya secara illegal. Padahal di banyak kasus, buruh migran adalah korban trafficking. Mereka dieksploitasi oleh agen penyalur dan majikan. Kasus-kasus seperti lamanya jam kerja, lingkungan kerja yang tidak layak, pelecehan dan kekerasan seksual, pemotongan gaji dan penahanan dokumen membuat buruh migran ada pada relasi kekuasaan yang timpang. Minimnya pendidikan, kesulitan akses informasi dan sikap represif pemerintah adalah permasalahan berat lainnya.

Di sisi pemerintah Indonesia, perlindungan juga sama lemahnya. Ketergantungan yang besar terhadap pasar tenaga kerja di Malaysia dan besarnya jumlah remittance yang dihasilkan dari buruh migran lantas membuat diplomasi Indonesia terhadap Malaysia terkait dengan buruh migran menjadi lemah. Di dalam negeri perlakuan hirau terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Masih tergantungnya pemerintah kepada sektor swasta, melalui PJTKI, sebagai penyalur dan lembaga pembekalan bagi buruh migran menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Dari sisi birokrasi yang berbelit dan sarat pungli adalah permasalahan ketidakseriusan lainnya.

Oleh karenanya artikel ini berpendapat bahwa kurangnya perlindungan terhadap buruh migran permasalahannya bukan terletak pada tingginya arus migrasi namun lebih kepada tata kelola buruh migran yang masih lemah dan persepsi keliru dalam melihat buruh migran baik di Indonesia maupun di Malaysia. Seperti dijelaskan diatas, buruh migran illegal jumlahnya adalah sama banyaknya dengan yang legal. Buruh illegal disini sama artinya dengan korban trafficking. Oleh karenanya permasalahan buruh illegal mengenai permasalahan trafficking dan pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut seharusnya dilandaskan pada pendekatan trafficking. Artinya, diselesaikan dengan mengacu pada norma hukum internasional dan melibatkan semua agensi termasuk NGO. Namun permasalahannya, Malaysia belum meratifikasi instrument HAM yang cukup. Selain itu Malaysia memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan HAM. Mahatir Muhammad mengatakan bahwa HAM tidaklah universal, untuk Asia, dimiliki apa yang dinamakan oleh Asian values, dan ini berbeda dengan nilai-nilai HAM yang selama ini dipahami di barat. Oleh karenanya kerja-kerja NGO asing di Malaysia menjadi sulit dilakukan (Chin, 1997; Gurowitz, 2000). Tambahan, berdasarkan oleh studi yang dilakukan oleh Christine Chin di tahun 1997, relasi kerja buruh migran yang bekerja di sektor domestik masih dilihat sebagai relasi kerja yang kapitalis, patriarki dan rasialis. Trafficking membuat relasi kerja menjadi tidakimbang. Buruh kemudian tidak memiliki kuasa atas pekerjaannya. Artinya meskipun buruh mendapatkan perlakuan yang salah dan kemudian tidak menyenangi pekerjaannya, dia tidak mempunyai kuasa atas itu. Relasi power yang besar dari pelaku yang kemudian mengisolir buruh dari akses informasi. Keterbatasan informasi dan kondisi ketergantungan yang tinggi inilah yang kemudian menjebak buruh dalam relasi kerja yang timpang. Terutamanya bagi buruh yang bekerja di sektor perkebunan dan rumah tangga. Lokasi perkebunan terpencil dan susah diakses, sedangkan domestik ranahnya adalah privat dan status kerja juga tidak diakui sebagai kerja sehingga perlindungan terhadapnya juga tidak dapat dilakukan.

² Buruh migrant di Malaysia tidak hanya dari Indonesia. Mereka juga berasal dari Bangladesh, Vietnam, Nepal, Myanmar, Kamboja, Pakistan dan Filipina. Namun jumlah buruh migrant terbesar tetaplah dari Indonesia, yang komposisinya mencapai 80% (*Star*, 11 Mei 2005).

Permasalahan seperti beban kerja yang berlebihan, praktek-praktek eksploitasi, kekerasan seksual, psikis dan verbal, kerap mewarnai perlakuan terhadap pekerja migran. Sedangkan instrument hukum yang ada di kedua negara tidak cukup melindungi hak-hak buruh migran. Dalam hubungan bilateral, telah ada MOU antara kedua belah pihak, dibuat tahun 2006 dan kemudian diperbarui tahun 2011. Karena sifatnya yang MoU, sanksi bindingnya tidak mengikat dan sekedar himbauan normative. Perlindungan diakui tapi tidak ada cukup mekanisme untuk kemudian mengaplikasikannya menjadi lebih efektif seperti tidak diaturnya upah minimum, lembur dan waktu libur.

Pertanyaan terakhir adalah lantas apa yang bisa dilakukan oleh Malindo? Berangkat dari permasalahan diatas, setidaknya ada tiga masalah yang bisa didekati oleh Malindo. Pertama, permasalahan buruh migran ada pada ranah HAM, maka penyelesaiannya disandarkan pada perspektif HAM. Penyelesaian yang represif dari Malaysia tidak bisa terus dilakukan. Analisa masalah ada pada pendekatan-pendekatan HAM. Malindo bisa menjembatani ini. Adanya persepsi HAM yang berbeda, yaitu HAM yang dipahami “barat” sebagai HAM yang universal yang tercantum dalam dokumen HAM internasional dan rezimnya dengan HAM yang dipahami lebih memiliki ikatan nilai-nilai Asia. Disini Malindo bisa berperan. Baik Indonesia dan Malaysia sudah menandatangani dokumen-dokumen HAM, Malindo bisa mendorong untuk semakin mengintensifkan aplikasinya. Nilai-nilai tersebut bisa ditambahkan pada nilai-nilai keagamaan yang dipahami bersama atau nilai-nilai HAM yang ada pada ASEAN. Malindo juga memiliki keuntungan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh inisiatif bersama, bisa mengisi jeda antara tidak “diakuinya” kerja-kerja NGO asing atau dianggap tidak obyektifnya laporan NGO asing selama ini.

Kedua, permasalahan buruh migran ada pada jalur distribusi. Proses perekrutan dan pelatihan buruh migran sebelum dikirim ke negara penerima dan distribusi setelah di negara penerima selama ini dilakukan oleh swasta. Penanganan oleh swasta tidak saja susah diawasi namun memunculkan pungutan yang besar kepada buruh migran. Pilihannya adalah distribusi dilakukan oleh swasta tapi pelatihan dan ketrampilan dilakukan oleh pemerintah. Pilihan lainnya adalah dengan meletakkan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah kemudian bisa menggandeng pihak lain. Meletakkan tanggung jawab dibawah koordinasi kedua pemerintah, memungkinkan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam perlindungan buruh migran misalnya dengan melakukan pendataan secara berkala, *home visit*, penyediaan balai latihan kerja yang terstandar dan tersertifikasi, surat izin investasi dengan penyertaan pasal mengenai buruh migran dsb. Malindo disini bisa bertindak untuk melakukan advokasi dan ikut ambil bagian dalam mekanisme monitoring.

Ketiga, permasalahan ada pada persepsi. Masih kuatnya persepsi kapitalis, patriarkis, dan rasialis membuat buruh migran ada posisi kerja yang timpang dan mendapatkan stigma buruk atas tindakan-tindakan kriminal yang kerap muncul. Ini tidak hanya permasalahan di hilir saja tapi juga terkait dengan hulunya. Buruh migran yang memiliki bekal cukup pendidikan dan ketrampilan akan meminimalkan stigma-stigma tersebut. Program sosialisasi, penegakan hukum, informasi yang mudah diakses akan meminimalkan kendala-kendala tersebut di hulu dan hilirnya. Dan Malindo bisa berada di garis depan untuk mengatasi hal-hal tersebut.

4. PERSOALAN DIASPORA

Istilah ‘diaspora’ tidak terlalu dikenal di Indonesia. Secara terminologis, diaspora berasal dari bahasa Yunani, διασπορά, yang berarti “penyebaran atau penaburan benih”; atau *speiro* yang berarti ‘menyebar’, dan *dia*, yang berarti ‘keluar’ (E-Diaspora Atlas 2011). Berkembangnya komunitas diaspora merupakan konsekuensi dari keluarnya mereka dari negara asal menuju tempat tujuan. Akan tetapi bersebaranya mereka ke berbagai tempat tidak diikuti dengan pola yang sama.³ Salah satu hal yang unik yang terjadi pada diaspora

³ Penelitian Michel Bruneau (2010, 39) menyimpulkan adanya empat variasi komunitas diaspora dapat dikelompokkan. (a) kelompok diaspora kewirausahaan (diaspora China, India, dan Lebanon); (b) kelompok diaspora keagamaan (diaspora Yahudi, Armenia, dan Yunani); (c) kelompok diaspora politik (seperti diaspora Palestina, yang sebagian dari mereka terlibat dalam keanggotaan PLO); (d) diaspora ras dan kebudayaan (contoh diaspora kaum kulit hitam/ *negroid* dari Afrika dan kaum minoritas Roma di Eropa).

Created with

adalah tersisanya *sense of belonging* pada negara asalnya. Bahkan rasa ini terus menerus dipupuk dari satu generasi ke generasi lain. Dengan demikian diaspora yang 'hidup dalam dua ruang' merupakan salah satu aktor etnik transnasional yang perannya patut diperhitungkan. Dalam terminologi Benedict Anderson, hubungan antara diaspora dengan negara asal dikenal dengan sebutan *long distance nationalism*. Kondisi ini terbentuk dan dinyatakan sebagai hasil dari ap nitas kebangsaan yang melahirkan perasaan saling memiliki. Komunitas diaspora semakin mendapat perhatian penting sebagai salah satu aktor non-negara sekaligus kekuatan penekan yang berpengaruh. Seperti halnya *transnational advocacy networks* (TANs)⁴, diaspora dengan jejaring etnik transnasionalnya tidak hanya sekedar berstatus sebagai 'imigran di negeri orang', namun lebih dari itu, para imigran yang membentuk hubungan melalui jejaring dengan sesama etnis yang tinggal di berbagai tempat di dunia dapat berperan menjadi aktor politik non-negara lintas batas yang mempengaruhi dinamika negara asalnya. Oleh Wyland (2004, 410), makna peran tersebut digambarkan sebagai,

- (1) *...form political networks that work across state borders to influence policies, thereby engaging in substate relations, and (2) its members have a common identity that spans state borders. Like TANs, transnational ethnic networks can be important actors on the world stage.*

Posisi lintas batas diaspora tersebut memungkinkan mereka berperan strategis dalam hubungan internasional. Karena 'hidup dalam dua ruang', diaspora merupakan salah satu kelompok yang dianggap berpengaruh terhadap perkembangan yang terjadi di negara asal. Salah satu kelebihan diaspora adalah posisi mereka yang strategis. Diaspora berada dalam posisi yang unik karena secara bersamaan, yaitu memahami dua budaya (budaya negara asal/induk dan negara tujuan). Posisi ini memungkinkan mereka menjadi agen ideal untuk menawarkan alternatif dengan cara lebih efektif dalam mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan. Mereka memahami konteks lokal dan mampu mengidentifikasi beragam tantangan terkait. Diaspora, dengan budaya hibrida yang dimilikinya dan akar transnasionalnya, memungkinkan mereka untuk menjadi penghubung penting antara dua budaya. Interaksi seperti ini berkontribusi pada munculnya jaringan lintas batas negara yang memfasilitasi hubungan intensif antara pihak diaspora dengan negara asalnya. Diaspora Indonesia memang tidak sebanyak diaspora Cina, India atau pun Yahudi, bahkan mungkin diaspora Filipina dan Vietnam jumlahnya lebih banyak daripada diaspora Indonesia. Namun diaspora Indonesia tersebar ke hampir seluruh penjuru dunia merupakan sesuatu yang menarik untuk menjadi perhatian. Kenyataan inilah yang mendorong digagasnya "Diaspora Indonesia", sebuah forum yang bermaksud mendayagunakan kemampuan para diaspora untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia.⁵ Di era global diaspora berkapasitas besar sebagai aset dan pelopor kesejahteraan.

Menurut Dino Patti Jalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, istilah diaspora Indonesia ditujukan pada "*semua orang di luar negeri yang berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia yang masih WNI ataupun yang sudah WNA*" (Djalal 2012). Untuk menjadi sebuah kekuatan dunia, diaspora merupakan lingkaran pertama yang perlu mendapat perhatian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat bahwa diaspora Indonesia lebih dari sekedar perantau, tapi juga merupakan komunitas besar yang dinamis dan penuh dengan potensi dan sumber daya (VOA News 2012). Mencontoh keberhasilan Cina, India, dan Yahudi, mendayagunakan diaspora adalah strategi baru Indonesia.

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan favorit orang Indonesia dengan berbagai alasan, seperti menuntut ilmu, reuni keluarga, dan mencari penghidupan yang lebih baik. Terdapat sekitar tiga juta orang Indonesia di Malaysia, baik yang menetap maupun tidak dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal sebagai buruh migran dengan sebutan "pahlawan devisa". Terlepas dari kegiatan yang mereka lakukan, diaspora Indonesia di Malaysia belum sepenuhnya dipandang sebagai aset. Menurut Djajal (2012)

⁴ Adalah struktur komunikatif yang para anggotanya termotivasi oleh prinsip-prinsip atau nilai bersama (Keck dan Sikkink 1998, 30)

⁵ Diaspora Indonesia dideklarasikan dalam kongres pertama di Los Angeles, Amerika Serikat pada 8 Juli 2012
Transformation Malaysia Indonesia Relation : Toward Asean Community 2015

selanjutnya, seperti banyak diaspora Indonesia di berbagai tempat, diaspora Indonesia di Malaysia belum bersinergi dalam sebuah wadah yang terintegrasi, mereka saling tercerai berai dan tidak saling mengenal, "ibarat ribuan titik tak terhubung", sehingga diaspora Indonesia menjadi "komunitas yang penuh potensi, tetapi lemah koneksi." Diaspora Indonesia di Malaysia tidak sekadar bermakna ekonomi, namun diaspora juga bermanfaat untuk " *re-proP ling* citra insan Indonesia di luar negeri", untuk mengatasi kesan negatif tentang warga Indonesia di luar negeri (Djalal 2012).

Bila selama ini diaspora lebih dimaknai ekonomi, sudah saatnya diaspora diberi makna sosial-politis. Posisi strategis diaspora memungkinkannya untuk memainkan peran penting dalam merekonstruksi hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Perbedaan persepsi dan kepentingan sering menjadi sumber konflik di antara dua negara sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Hubungan konflik aktual ini memang tidak terjadi di semua lapisan masyarakat, namun potensi eskalasinya dapat dengan mudah menstimuli konflik ke berbagai P hak, terutama di kalangan generasi muda. Fakta ini nampak jelas dengan munculnya berbagai insiden dan berdampak meluas seperti penyebutan negatif kepada dua negara yang dilakukan akhir-akhir ini melalui dunia maya. Sebagai contohnya, selama masa konflik Ambalat dan 'klaim budaya', banyak laman yang memuat berita-berita terkait. Karena dilakukan melalui dunia maya, generasi muda akan dengan mudah mengakses laman-laman yang memuat berita-berita terkait. Untuk merespon hal ini diperlukan upaya kuratif maupun preventif agar generasi muda tidak terdampak oleh peristiwa tersebut. Dalam kaitan ini diaspora

Indonesia di Malaysia perlu mengambil peranan sebagai agen '*image building*' antara kedua Negara.

Pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Malindo-Indonesia dalam masalah diaspora Indonesia di Malaysia, antara lain:

- a. Membentuk forum Diaspora Indonesia di Malaysia, sebagai tindak lanjut dari Congress of Indonesian Diaspora untuk mempertemukan dan mensinergikan berbagai profesi.
- b. Secara lebih khusus forum-forum profesi membentuk kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan *conf dence building* antara ilmuwan Indonesia dan ilmuwan Malaysia.
- c. Diaspora diberdayakan dengan memberi makna sosial-politis sebagai agen yang mampu menciptakan hubungan non-konflik aktual.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan konflik antara Indonesia dengan Malaysia dapat didekati melalui diplomasi sosio-kultural dengan memanfaatkan persamaan-persamaan dalam faktor itu yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia. Pusat Studi Malindo dapat mengambil peran aktif sebagai penghubung. Sebagai forum ilmiah, Malindo memegang peran penting yang dapat membantu peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.

Sebagai sebuah lembaga akademik, Malindo dapat menempatkan diri sebagai *inner circle* yang netral tanpa berP hak karena para ilmuwan yang tergabung dalam lembaga tersebut memiliki kapasitas yang dapat diterima oleh berbagai P hak.

DAFTAR BACAAN

- Bruneau, Michel, 2010. "Diasporas, transnational spaces and communities", dalam Rainer Bauböck dan Thomas Faist. *Diaspora and Transnationalism*, Amsterdam, Amsterdam University Press.
- Chin, CBN. 1997. Walls of Silence and Late Twentieth Century Representations of the Foreign female Domestic Workers: the Case of Filipina and Indonesian Female Servants in Malaysia. *The International Migration Review*, vol. 31, no. 2.
- Djalal, Dino Patti, 2012. Diaspora Indonesia. Kompas, 2 Juli 2012.
- E-Diaspora Atlas, 2011. *Diaspora Theory in the TIC Age*, (online) dalam <http://ediasporas.ticmigrations.fr/about/contexte/?lang=en>. Diakses 1 Mei 2011.
- Gurowitz, A. 2000. Migrant Rights and Activism in Malaysia: Opportunities and Constraints. *The Journal of Asian Studies*, vol. 59, no. 4.
- Hunt, L. 2009, 'Love Thy Neighbour', *The Diplomat*, 10 October 2009.
- Kaur, A. 2005. Indonesian Migrant Workers in Malaysia: from Preferred Migrants to 'last to be hired' workers. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 39, no. 2.
- Liow, J. 2003. Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: In Search of Solutions. *Contemporary Southeast Asia*, vol. 25, no. 1.
- Malay Mail*, 'Its Nationalism', 10 September 2009.
- Maria, Stephanie S. 2010. Malaysia Has "Excellent" Human Trafficking System. *Human Rights Watch Report*. 2 Agustus.
- Marks, K. 2009, 'Rivals of the East: Battle for Batik', *The Independent*, 28 September 2009.
- Noor, F. 2009, *Malaysian-Indonesian Relations and the 'Cultural Dispute' between the Two Countries*, Institut De Recherches Et Prospective Postales.
- Phuket Newa*, 'Thais Asks; Who Owns the Jeeb?', 20 August 2011.
- Seattle Times*, 'Malaysia Blames Discovery Channel in Dance Flap', 4 September 2009.
- VOA News, 2012. Presiden SBY akan Bentuk Unit Khusus untuk Diaspora. <http://www.diasporaindonesia.org/media/news/news14.php>. Diakses 7/1/2013
- Wayland, Sarah, 2004. Ethnonationalist Networks and Transnational Opportunities: The Sri Lankan Tamil Diaspora. *Review of International Studies*, Vol. 30, No. 3 (Jul., 2004), pp. 405-426.